



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

DETERMINAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

**Adriyana Sinta Devi^{1,2}, Provita Wijayanti¹, Muhammad Ja'far Shodiq¹, Chrisna
Suhendi¹**

¹ Department of Accounting, Faculty of Economics, Universitas Islam Sultan Agung

² Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro

E-mail : adriyanasd829@gmail.com

Abstract

In the era of reform, the management of financial reports continues to improve in order to enhance government governance. The aim of this study is to analyze the determinants of the quality of local government financial reports in Bojonegoro Regency, which include the role of Digital Accounting Systems, Human Resource Competence, and Internal Control Systems. The data used in this study are primary data. The population in this research consists of all financial management officials within the Regional Apparatus Organizations (OPD) in Bojonegoro Regency. The sample was selected using a purposive sampling method, with a total of 118 respondents from 59 OPD's in Bojonegoro Regency. The analysis technique used in this study was processed using Smart PLS. The results of the study indicate that the Digital Accounting System, Human Resource Competence, and Internal Control System influence the Quality of Local Government Financial Reports in Bojonegoro Regency. This research contributes to the understanding of factors that affect the quality of local government financial reports and is expected to provide recommendations that contribute to improving accountability, OPD performance, and strategic decision-making within the Bojonegoro Regency Government.

Keywords : Digital Accounting System, Human Resources, Internal Control System, and Quality of Financial Reports.

Abstrak

Di era reformasi, pengelolaan laporan keuangan terus diperbaiki untuk meningkatkan tata kelola Di era reformasi, pengelolaan laporan keuangan terus diperbaiki untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis determinan kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro yang meliputi peran Sistem Akuntansi Digital, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Internal. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Populasi dalam penelitian ini yaitu semua pejabat pengelola keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bojonegoro. Sampel penelitian ini diambil menggunakan metode purposive sampling, dengan sampel sebanyak 118 responden dari 59 OPD di Kabupaten Bojonegoro. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini yang diolah dengan menggunakan Smart PLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi digital, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan diharapkan memberikan rekomendasi diharapkan memberikan kontribusi dalam peningkatan akuntabilitas, kinerja OPD, dan pengambilan keputusan strategis di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Kata kunci : Sistem Akuntansi Digital, Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, dan Kualitas Laporan Keuangan.



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

PENDAHULUAN

Tuntutan masyarakat terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah yang berkualitas serta berorientasi pada prinsip *good governance* semakin meningkat. Kondisi ini mendorong perlunya pergeseran paradigma dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk pembaruan prinsip-prinsip manajerial yang mencakup tahapan perencanaan anggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Seiring dengan era reformasi, sistem pengelolaan keuangan publik terus mengalami perbaikan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Upaya perbaikan ini didukung melalui diberlakukannya Paket Undang-Undang Keuangan Negara, yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tahun 2017, laporan keuangan merupakan penyajian yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas, yang bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan tentang kondisi keuangan, kinerja, serta arus kas entitas guna mendukung pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang berkualitas harus bebas dari kesalahan penyajian material, menyampaikan informasi secara lengkap dan transparan (*full disclosure*), serta menyajikan angka-angka yang dapat dipertanggungjawabkan dan ditelusuri. Hal ini bertujuan agar laporan tersebut mampu menyediakan informasi keuangan yang akurat dan dibutuhkan oleh para pengguna laporan (Gasperz, 2019).

Pemerintahan yang menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas ditandai dengan adanya jaminan bahwa seluruh informasi serta aktivitas penting pemerintah terdokumentasi secara sistematis dan dapat diukur melalui indikator-indikator yang jelas, yang kemudian dirangkum ke dalam laporan keuangan melalui proses akuntansi (Syarifudin et al., 2020). Sistem akuntansi keuangan daerah berperan sebagai serangkaian prosedur terstruktur yang mencakup tahap pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, hingga penyusunan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan (Ardianto & Eforis, 2019).

Sistem Informasi Akuntansi Digital pada pemerintah daerah merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010, yang mewajibkan seluruh pemerintah daerah untuk



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

menerapkan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dalam rangka mendukung pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Implementasi sistem informasi akuntansi keuangan ini menjadi elemen penting dalam upaya menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Pengelolaan keuangan daerah melalui sistem informasi tersebut dilakukan dengan mengintegrasikan teknologi informasi dalam setiap proses pencatatan dan pelaporan keuangan guna meningkatkan efisiensi, akurasi, serta keandalan data keuangan yang disajikan.

Keandalan laporan keuangan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem informasi yang digunakan, tetapi juga dipengaruhi secara signifikan oleh kompetensi sumber daya manusia (SDM) serta efektivitas sistem pengendalian internal. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Digital, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010, merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan akuntabel. Namun, pemanfaatannya akan optimal jika didukung oleh SDM yang kompeten dan sistem pengendalian internal yang kuat. Ketiganya saling berpengaruh dalam menciptakan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai standar.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan efektivitas sistem pengendalian internal memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, temuan yang tidak konsisten dari berbagai studi menunjukkan bahwa masih diperlukan penelitian lanjutan dalam konteks daerah tertentu, termasuk di Bojonegoro.

Sistem pengendalian internal merupakan salah satu faktor krusial yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Darmawan dan Darwanis (2018), sistem ini bertujuan untuk membantu organisasi dalam mencapai efisiensi dan efektivitas operasional melalui pelaksanaan kegiatan yang terencana dan terkendali. Selain itu, sistem pengendalian internal juga berperan dalam menjamin keandalan laporan keuangan, melindungi aset negara, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sejalan dengan itu, Gasperz (2019) menegaskan bahwa penerapan pengendalian internal secara berkelanjutan sangat penting guna meminimalkan kesalahan dan risiko, serta mendorong peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) memiliki peran krusial dalam menjamin akurasi dan keandalan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. SPI yang efektif dapat meminimalkan risiko kesalahan serta kecurangan, sehingga berdampak langsung pada peningkatan kualitas laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

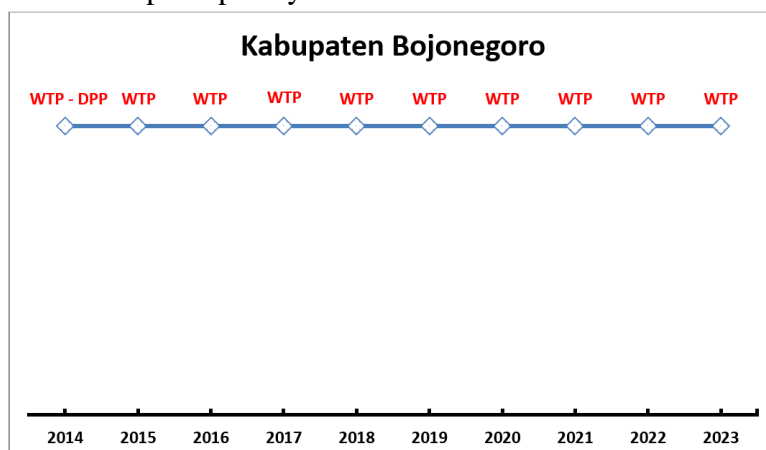
<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang menyatakan bahwa kewajaran informasi keuangan dalam laporan keuangan dinilai berdasarkan efektivitas sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh entitas pemerintah.

Dalam praktiknya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor eksternal, secara konsisten melakukan evaluasi terhadap efektivitas SPI dalam setiap proses audit. Evaluasi tersebut tidak hanya berfungsi untuk menilai tingkat kepatuhan dan integritas sistem yang diterapkan, tetapi juga menjadi dasar dalam menentukan luas lingkup dan kedalaman pengujian yang akan dilakukan selama proses pemeriksaan. Dengan demikian, keberadaan SPI yang memadai merupakan faktor fundamental dalam mewujudkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dan dapat dipercaya.



Gambar 1. 1 Hasil Pemeriksaan LKPD Kabupaten Bojonegoro

Setiap tahun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengevaluasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan diberikan opini audit sebagai bentuk penilaian atas kewajaran penyajian laporan keuangan tersebut. Opini yang dapat diberikan antara lain Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan menunjukkan bahwa laporan keuangan entitas pemerintah daerah telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Dengan demikian, laporan tersebut dianggap telah disusun dan disajikan secara relevan, andal, dapat dibandingkan, serta mudah dipahami oleh para pengguna informasi keuangan (Prabowo, 2021).

Dalam perjalanannya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menerima opini WTP selama 10 tahun berturut-turut, meskipun pada tahun 2014 mendapat opini WTP Dengan



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

Paragraf Penjelasan (WTP-DPP). Dalam pemeriksaannya, BPK masih menemukan sejumlah masalah dalam praktik pengelolaan keuangan seperti lemahnya sistem pengendalian internal, keterbatasan SDM, dan keterlambatan pelaporan. Menurut BPK, opini WTP bukan jaminan bebas dari kecurangan, dan masih adanya penyimpangan dalam laporan keuangan menunjukkan perlunya peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang dijuluki sebagai kota minyak memiliki APBD yang sangat besar mencapai Rp7,4 triliun pada tahun 2023 dan menduduki posisi ke-2 APBD tertinggi se-Indonesia. Jika APBD tinggi tentunya tugas dan tanggung jawab semakin besar untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara transparan dan akuntabel. Berdasarkan permasalahan yang muncul menjadi indikator bahwa kualitas laporan keuangan daerah perlu dikaji lebih dalam. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengevaluasi sejauh mana sistem akuntansi digital, kapasitas Sumber Daya Manusia, dan efektivitas sistem pengendalian internal berkontribusi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro.

LITERATUR REVIEW DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Stewardship Theory

Penelitian ini didasari oleh teori stewardship sebagai landasan teoritis utama. Teori ini menjelaskan bahwa para eksekutif tidak semata-mata digerakkan oleh kepentingan pribadi, melainkan berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan (Donaldson & Davis, 1991). Penelitian akuntansi untuk organisasi sektor publik, seperti pemerintah dan organisasi nirlaba lainnya, dapat menggunakan teori stewardship (Wilson, 2010). Akuntansi sektor publik telah dipersiapkan sejak awal perkembangannya untuk memenuhi kebutuhan informasi akan hubungan antara steward dan prinsipal. Hubungan Stewardship theory terhadap kualitas laporan keuangan daerah yaitu eksekutif sebagai steward dapat bertindak sesuai kepentingan masyarakat, dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan kekayaan negara kepada masyarakat (Löhde, Campopiano, and Calabrò 2020).

Implikasi dari stewardship theory dalam penelitian ini dapat digunakan untuk menjelaskan peran pemerintah daerah sebagai entitas yang dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik. Pemerintah daerah diharapkan mampu menjalankan tugas dan



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

fungsinya secara tepat serta menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang dikelolanya. Dengan demikian, tujuan ekonomi, peningkatan pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal. Para steward, termasuk manajemen dan auditor internal memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkan keahlian mereka dalam memperkuat efektivitas sistem pengendalian internal, sehingga mampu menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas, andal, dan akuntabel.

Sistem Akuntansi Digital Keuangan Daerah

Sistem Akuntansi Digital Keuangan Daerah adalah sistem yang menggunakan teknologi digital untuk membuat, mengelola, menyimpan, dan memindahkan informasi keuangan daerah secara elektronik. Sistem ini dapat membantu pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dengan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan auditabel. Berikut ini beberapa sistem akuntansi keuangan daerah:

a. SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah)

Aplikasi keuangan daerah yang mengintegrasikan mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan secara digital dan terintegrasi. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 menjadi dasar hukum bagi seluruh pemerintah daerah untuk menggunakan SIPD.

b. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sejak tahun 2003 sebagai upaya untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah melalui penerapan teknologi informasi. SIMDA dirancang secara komprehensif dengan berbagai modul terintegrasi, antara lain SIMDA Keuangan, SIMDA Barang Milik Daerah (BMD), SIMDA Gaji, SIMDA Pendapatan, SIMDA Perencanaan, dan SIMDA Cash Management System (CMS). Setiap modul mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan daerah secara sistematis dan terdokumentasi.

c. SAKD (Sistem Akuntansi Keuangan Daerah)

Aplikasi yang dikembangkan Kementerian Keuangan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan berbasis akrual sesuai standar pemerintah. Aplikasi ini mendukung proses rekonsiliasi dan pelaporan dari pemerintah daerah ke pusat.

Kapasitas Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kualitas tinggi merupakan aset penting



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

bagi organisasi dalam mencapai tujuan secara lebih efisien dan efektif. Kompetensi SDM menjadi faktor strategis yang memengaruhi kemampuan organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya secara optimal. Individu yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan akan menunjukkan produktivitas yang tinggi serta mampu menyelesaikan tugas dengan cepat dan tepat. Dalam konteks pelaporan keuangan, SDM yang kompeten sangat berperan dalam menjamin keakuratan dan ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan, karena mereka memiliki pemahaman yang memadai mengenai prinsip-prinsip akuntansi dan keuangan, serta latar belakang pendidikan yang mendukung. Selain itu, SDM yang menyusun laporan keuangan dituntut untuk memiliki integritas, kejujuran, dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Hal ini sejalan dengan asumsi dasar teori stewardship, yang menyatakan bahwa individu secara alamiah memiliki karakter dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan berperilaku jujur dalam menjalankan amanah yang diberikan (Rifandi, 2019).

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan sistem yang mencakup struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang saling terkoordinasi guna melindungi aset organisasi, memastikan ketelitian serta keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi operasional, dan menjamin kepatuhan terhadap kebijakan manajemen (Mulyadi, 2013). Sementara itu, Hery (2013) mendefinisikan pengendalian internal sebagai sekumpulan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk melindungi kekayaan entitas dari potensi penyalahgunaan, menyediakan informasi akuntansi yang akurat dan andal, serta menjamin bahwa seluruh aktivitas organisasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan kebijakan internal yang berlaku. Kedua definisi ini menunjukkan bahwa pengendalian internal memiliki peran penting dalam menjaga integritas keuangan organisasi sekaligus mendukung terciptanya tata kelola yang baik.

Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Mulyana (2010), kualitas dapat dimaknai sebagai tingkat kesesuaian terhadap standar yang telah ditetapkan, yang pengukurannya didasarkan pada tingkat ketidaksesuaian dan dicapai melalui proses pemeriksaan atau evaluasi. Dalam konteks pemerintahan daerah, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan bentuk pertanggungjawaban resmi atas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

Daerah (APBD) selama satu tahun anggaran. Kualitas laporan keuangan mengacu pada informasi yang disajikan secara wajar, bebas dari distorsi maupun kesalahan material, mencerminkan kondisi yang sebenarnya, serta dapat diverifikasi oleh pihak yang berwenang. Karakteristik kualitas laporan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah ukuran-ukuran normatif yang diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga tujuan dalam sebuah organisasi. Karakteristik kualitas laporan menurut peraturan tersebut meliputi (1) relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan, (4) dapat dipahami.

Pengaruh Sistem Akuntansi Digital Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Sistem akuntansi digital menggantikan sistem manual dengan pemanfaatan teknologi informasi yang memungkinkan proses pencatatan, pengolahan, dan pelaporan keuangan dilakukan secara lebih efisien, akurat, dan transparan. Peningkatan akurasi, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas yang dihasilkan dari sistem digital ini akan membantu menghasilkan laporan keuangan yang lebih andal dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penggunaan digitalisasi dalam sistem akuntansi pemerintah daerah tidak hanya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan, tetapi juga memperkuat pengelolaan keuangan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan publik. *H₁: Sistem Akuntansi Digital memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.*

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Kompetensi sumber daya manusia mencerminkan kemampuan individu, instansi, atau Lembaga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Kompetensi ini mencakup aspek teknis, konseptual, dan perilaku yang diperlukan untuk menghasilkan kinerja optimal. Penemuan ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Vira Varista (2022), yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Artinya, pengelolaan sumber daya manusia yang efektif akan menciptakan tenaga kerja yang kompeten sehingga pada akhirnya mampu menghasilkan laporan keuangan yang andal dan sesuai standar akuntansi yang berlaku.



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

H₂: Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

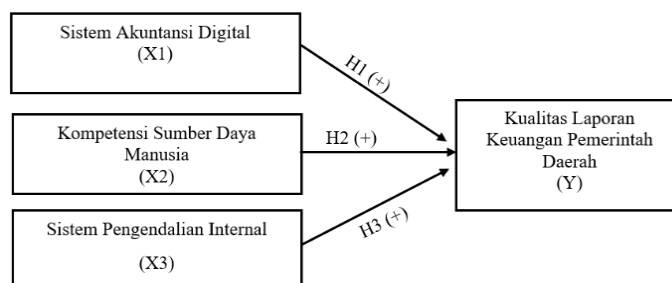
Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Sistem pengendalian internal merupakan suatu mekanisme yang terstruktur dan saling terkoordinasi untuk melindungi aset organisasi serta memastikan ketepatan dan keandalan pencatatan transaksi akuntansi. Berdasarkan pandangan Mulyadi (2014:163), pengendalian internal dapat disimpulkan sebagai serangkaian kebijakan dan prosedur yang dirancang serta dilaksanakan oleh individu atau pihak yang berwenang guna memberikan jaminan atas efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku.

H₃: Sistem Pengendalian Internal memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Kerangka Penelitian

Hubungan Stewardship theory dengan kualitas laporan keuangan daerah yaitu ketika eksekutif sebagai steward bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Untuk mewujudkannya pemerintah membuat laporan keuangan daerah yang berkualitas apabila didukung oleh sistem akuntansi digital, sumber daya manusia yang penempatan sesuai kelahliannya, dan efektivitas Sistem Pengendalian Internal. Adapun kerangka penelitian dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan dilaksanakan pada



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengelola keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Sampel yang digunakan sebanyak 118 responden dari 59 OPD, yang terdiri atas Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu metode penentuan sampel berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Pemilihan teknik ini bertujuan untuk memperoleh data yang lebih representatif dan relevan dengan permasalahan serta tujuan penelitian (Sugiyono, 2015). Adapun kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini meliputi:

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- b. Pegawai yang memiliki tanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan di instansi terkait;
- c. Pegawai yang terlibat secara langsung dalam implementasi sistem akuntansi digital, sistem pengendalian internal, serta yang berkaitan dengan aspek kompetensi sumber daya manusia pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Metode pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner atau angket. Metode angket merupakan suatu metode pengumpulan data dimana penulis secara langsung atau tidak langsung menyebarkan pendapat dan pertanyaan tertulis kepada responden dan meminta mereka untuk memberikan tanggapan (Sugiyono, 2019). Jika jumlah responden sangat banyak dan tersebar luas, sebaiknya gunakan survei. Survei dapat berisi pertanyaan atau komentar publik atau pribadi. Berdasarkan metode survei, penulis mendistribusikan angket secara online menggunakan Google Formulir.

Metode pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala Likert, yang digunakan untuk mengukur persepsi responden terhadap variabel sistem akuntansi digital, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal. Melalui pendekatan ini, setiap variabel dijabarkan ke dalam sejumlah indikator yang kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan item-item instrumen penelitian berupa pernyataan atau pertanyaan. Skala Likert yang digunakan terdiri dari lima tingkat penilaian, yaitu: 1 = Sangat Tidak Setuju; 2 = Tidak Setuju; 3 = Netral; 4 = Setuju; dan 5 = Sangat Setuju.

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan bantuan perangkat lunak SmartPLS, yang dioperasikan melalui media komputer. Teknik Partial Least Square (PLS)



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

merupakan pendekatan Structural Equation Modeling (SEM) berbasis varian, yang memungkinkan dilakukannya pengujian terhadap model pengukuran dan model struktural secara simultan. Model pengukuran digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas konstruk, sedangkan model struktural digunakan untuk menguji hubungan kausal antar variabel. Proses estimasi dalam PLS dilakukan melalui teknik bootstrapping, yaitu metode penggandaan sampel secara acak untuk menguji signifikansi statistik dari parameter-parameter model.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka diperoleh data dari pengiriman dan pengolahan data kuesioner dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1 : Rincian Penyebaran Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner tersebar	118	100%
Kuesioner kembali	112	94,91%
Kuesioner tidak kembali	6	5,08%
Kuesioner tidak dapat diolah	0	0%
Kuesioner dapat diolah	112	94,91%

Sumber : Data primer yang diolah penulis

Jumlah data yang disebarluaskan sebanyak 118 kuesioner dan yang memberikan respon sebanyak 112 kuesioner atau 94,91%. Kuesioner yang tidak memberikan respon sejumlah 6 kuesioner atau 5,08%, hal tersebut disebabkan karena pegawai memiliki kesibukan dan saat pembagian kuesioner terdapat salah satu OPD yang mengalami pergantian bendahara, sehingga tidak memberikan respon terkait kuesioner yang telah diberikan. Data kuesioner yang dapat diolah sebesar 112 responden dengan berbagai gambaran, diantaranya jabatan, pendidikan terakhir jenis kelamin, dan lama bekerja. Berikut merupakan rincian hasil gambaran dari kuesioner dan dapat dilihat pada Tabel 4.2 hingga Tabel 4.5.

Tabel 4.2 : Jabatan

Keterangan	Jumlah	Persentase
Pejabat Penatausahaan Keuangan	55	49,10%



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

Bendahara Pengeluaran	57	50,90%
Jumlah	112	100%

Sumber : Data primer yang diolah penulis

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diperoleh data bahwa responden yang menempati jabatan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebanyak 55 orang atau 49,11%, sedangkan yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran sebanyak 57 orang dengan presentase sebesar 50,90%.

Tabel 4.3 : Jenis Kelamin

Keterangan	Jumlah	Persentase
Laki-laki	68	60,71%
Perempuan	57	39,29%
Jumlah	112	100%

Sumber : Data primer yang diolah penulis

Data yang dihasilkan pada Tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa responden yang memiliki jenis kelamin perempuan sebanyak 57 orang atau sebesar 39,29% dari 112 responden, sedangkan jenis kelamin laki-laki sejumlah 68 orang dari 112 responden atau sebesar 60,71% dari total presentase.

Tabel 4.3 : Pendidikan Terakhir

Keterangan	Jumlah	Persentase
SMA/SMK/MA	19	16,97%
Diploma III	5	4,46%
S1 / D IV	54	48,21%
S2 / S3	34	30,36%
Jumlah	112	100%

Sumber : Data primer yang diolah penulis

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa responden yang memiliki pendidikan terakhir SMA/SMK/MA sebesar 16,97% atau sebanyak 19 responden. Responden yang memiliki pendidikan Diploma III sebesar 4,46% atau sebanyak 5 responden. Responden yang memiliki pendidikan Diploma IV maupun S1 sebesar 48,21% atau sebanyak 54 responden. Informasi terkait pendidikan responden dianggap penting karena dengan mengetahui pendidikan responden dapat menilai Tingkat pemahaman responden.

Tabel 4.4 : Lama Bekerja

Keterangan	Jumlah	Persentase
1-5 Tahun	8	7,14%



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

5 Tahun - 10 Tahun	1	0,89%
10 Tahun- 15 Tahun	20	17,86%
>15 Tahun	83	74,11%
Jumlah	112	100%

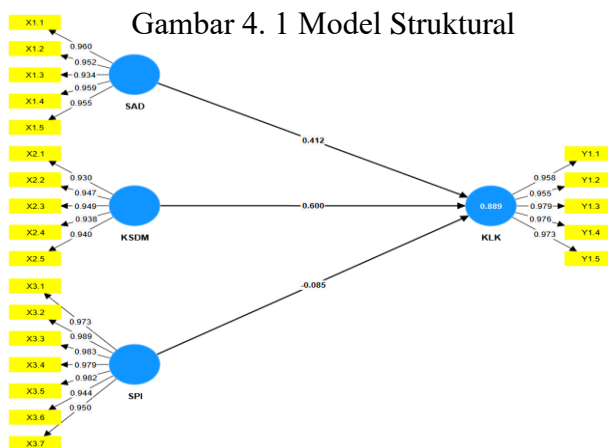
Sumber : Data primer yang diolah penulis

Berdasarkan Tabel 4.5 diketahui bahwa responden yang memiliki lama kerja satu hingga lima tahun sebanyak 8 responden atau 7,14%. Responden yang memiliki lama kerja lebih dari 5 tahun dan kurang dari 10 tahun hanya satu responden atau sebesar 0,89%. Responden yang memiliki lama kerja 10 hingga 15 tahun sebanyak 20 repoden atau sebesar 17,86%. Responden yang memiliki lama keerja lebih dari 15 tahun sebanyak 83 responden atau sebesar 74,11%. Informasi terkait pegalaman lama bekerja di OPD dapat menilai seberapa besar responden mengetahui keadaan OPD.

B. Pengujian dan Hasil Analisis Data

B.1 Pengujian Pengukuran Model (Outer Model)

Analisis pengujian instrumen dalam penelitian ini dapat dilihat pada pengujian pengukuran model dari uji validitas dan reliabilitas. Hasilnya dapat dijelaskan sebagai berikut:



Sumber: Data diolah oleh penulis

i. Uji Validitas Kovergen (*Outer Model*)

Pengujian validitas dilakukan untuk mengukur sejauh mana suatu instrumen penelitian mampu mengukur konstruk atau konsep yang dimaksud. Pengujian ini dilakukan guna memastikan bahwa setiap indikator dalam instrumen benar-benar merepresentasikan variabel yang diteliti sesuai dengan landasan teori yang digunakan



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

(Ghozali, 2014: 37).

Tabel 4.6 Validitas Konvergen

Konstruk dan Indikator	Loading Factor	AVE
Sistem Akuntansi Digital (SAD)		0.937
SAD1	0.960	
SAD3	0.952	
SAD3	0.934	
SAD4	0.959	
SAD5	0.955	
Kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM)		0.885
KSDM1	0.930	
KSDM2	0.947	
KSDM3	0.949	
KSDM4	0.938	
KSDM5	0.940	
Pengendalian Internal (SPI)		0.906
SPI1	0.973	
SPI2	0.989	
SPI3	0.983	
SPI4	0.979	
SPI5	0.982	
SPI6	0.944	
SPI7	0.950	
Kualitas Laporan Keuangan (KLK)		0.944
KLK1	0.958	
KLK2	0.955	
KLK3	0.979	
KLK4	0.976	
KLK5	0.973	

Sumber: Data primer yang diolah penulis

Hasil uji validitas variabel di atas menunjukkan bahwa semua indikator telah memenuhi syarat $>0,6$ atau $>0,7$ dan nilai AVE sudah diatas $>0,5$.

ii. Validitas Diskriminan (*Outer Model*)

Batasan nilai AVE yang disarankan dalam sebuah penelitian eksploratori adalah lebih besar dari 0.5. Sedangkan untuk melihat validitas diskriminan, harus memuat



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

prinsip bahwa *manifest variabel* yang berbeda harusnya tidak berkorelasi tinggi. Untuk melihat validitas diskriminan dapat melihat *cross loading* setiap variabel harus lebih dari 0.70. Selain cara tersebut dapat juga menggunakan rumus perbandingan akar kuadrat AVE dengan nilai korelasi antar konstruk dalam sebuah model. Tabel 4.7 menjelaskan mengenai validitas diskriminan.

Tabel 4.7
Uji Validitas Diskriminan

	KLK	KSDM	SAD	SPI
KLK	0.968			
KSDM	0.935	0.941		
SAD	0.921	0.949	0.952	
SPI	0.602	0.658	0.710	0.972

Sumber: Data primer yang diolah penulis

Berdasarkan hasil uji validitas diskriminan yang disajikan dalam Tabel 4.7, dapat dilihat bahwa nilai akar dari *Average Variance Extracted* (AVE) untuk setiap variabel lebih besar dari 0,5, yang menunjukkan bahwa setiap konstruk dalam model ini memiliki diskriminasi yang valid.

KLK memiliki nilai 0,968, KSDM 0,941, SAD 0,952, dan SPI 0,972. Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa masing-masing konstruk dapat dibedakan dengan jelas dari konstruk lainnya dalam model penelitian ini. Selain itu, hubungan antar konstruk juga menunjukkan validitas diskriminan yang baik, yang mengindikasikan bahwa variabel-variabel tersebut tidak saling tumpang tindih dan dapat diukur secara independen.

iii. Uji Reliabilitas (*Outer Model*)

Uji reliabilitas dilakukan untuk menilai konsistensi dan stabilitas alat ukur dalam mengukur konstruk yang dimaksud. Reliabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa instrumen penelitian mampu menghasilkan data yang konsisten dalam berbagai kondisi pengukuran. Adapun hasil uji reliabilitas untuk masing-masing konstruk adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8 Uji Reliabilitas



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
KLK	0,983	0.983	0.987	0.937
KSDM	0,968	0.968	0.975	0.885
SAD	0,974	0.975	0.980	0.906
SPI	0,990	0.991	0.992	0.944

Sumber: Data diolah, 2025

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa semua variabel telah memenuhi nilai >0.7 baik dari *composite reliability* dan *cronbach alpha*. Maka, dapat diambil kesimpulan bahwa pengukur yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi uji reliabilitas.

B.2 Pengujian Model Struktural (Inner Model)

Model struktural atau inner model merepresentasikan hubungan antara variabel laten yang dibangun berdasarkan teori substantif yang mendasari penelitian. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengevaluasi model struktural adalah nilai R-Square (R^2), yang mencerminkan seberapa besar variabel laten independen mampu menjelaskan variabel laten dependen dalam model. Nilai R-Square yang tinggi menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh substantif terhadap variabel dependen (Ghozali, 2014). Pengujian model struktural dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak SmartPLS versi 4. Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai R-Square untuk masing-masing variabel dependen sebagai berikut:

Tabel 4.7 Nilai R-Square

	R Square	R Square Adjusted
KLK	0.889	0.886

Sumber: Data diolah oleh penulis

Nilai R Square sebesar 0,889 menunjukkan bahwa sekitar 88,9% variabilitas dalam Kualitas Laporan Keuangan (KLK) dapat dijelaskan oleh variabel-variabel yang digunakan dalam model ini. Sedangkan R Square Adjusted yang bernilai 0,886 menunjukkan bahwa setelah mempertimbangkan jumlah variabel independen dalam model, 88,6% dari variasi KLK masih dapat dijelaskan, yang menunjukkan bahwa model ini cukup baik dalam



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>

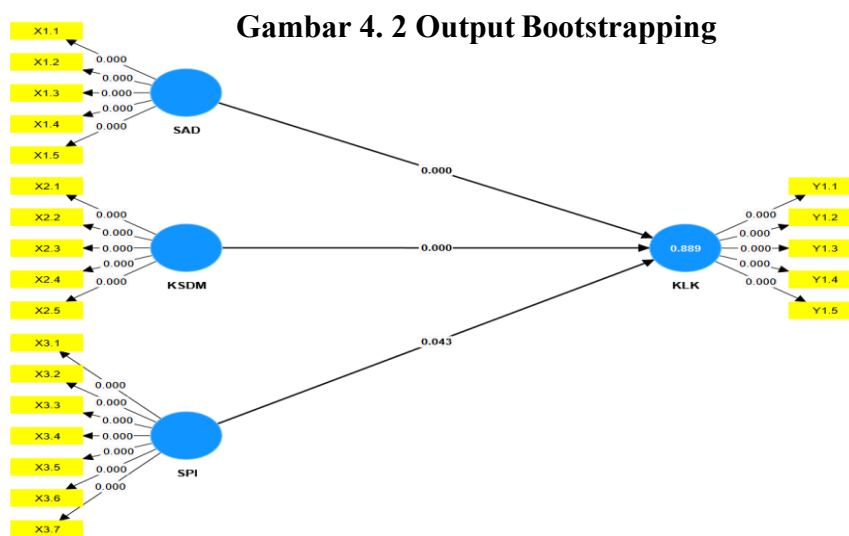


IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

menggambarkan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti dengan KLK.

B.3 Uji Hipotesis

Untuk menentukan apakah suatu hipotesis diterima atau ditolak, dapat dilihat dari nilai signifikansi antar konstruk, nilai T-statistik, dan P-values. Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan melalui uji T untuk menguji pengaruh antar variabel. Uji T dilakukan dengan membandingkan nilai T-statistik dengan nilai T-tabel. Seluruh pengujian dilakukan dengan bantuan software SmartPLS (*Partial Least Square*) 4. Nilai-nilai T-statistik, P-value, dan koefisien beta diperoleh dari hasil bootstrapping yang dilakukan melalui SmartPLS. Adapun kriteria pengujian hipotesis (rules of thumb) dalam penelitian ini adalah: hipotesis diterima apabila nilai T-statistik > 1,96, nilai P-value < 0,05 (5%), dan koefisien beta bernilai positif.



Sumber: Data diolah, 2025

Tabel 4.8 Uji Hipotesis

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
KSDM -> KLK	0,600	0,596	0,097	6,157	0,000
SAD -> KLK	0,412	0,416	0,106	3,900	0,000
SPI -> KLK	-0,085	-0,089	0,042	2,028	0,043

Sumber: Data diolah oleh penulis

Berdasarkan hasil analisis data diatas, pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

(KSDM) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (KLK) menunjukkan hubungan yang signifikan dengan nilai T Statistics sebesar 6,157 dan P-Value yang sangat rendah (0,000), yang menunjukkan bahwa KSDM memiliki pengaruh yang kuat terhadap KLK. Hal ini menunjukkan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Selanjutnya, analisis hubungan antara Sistem Akuntansi Digital (SAD) dan Kualitas Laporan Keuangan (KLK) juga menunjukkan pengaruh yang signifikan dengan nilai T Statistics sebesar 3,900 dan P-Value sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi digital dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Selain itu juga menunjukkan sistem akuntansi digital berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Analisis hubungan antara Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Kualitas Laporan Keuangan (KLK) juga menunjukkan pengaruh yang signifikan dengan nilai T Statistics sebesar 2,028. Nilai koefisien negatif (-0,085) dan $p\text{-value} < 0,05$ mengindikasikan bahwa SPI berpengaruh signifikan, namun arah pengaruhnya tidak sesuai harapan. Ini bisa menjadi indikator bahwa penerapan SPI saat ini belum berjalan efektif, atau bahkan menjadi hambatan dalam peningkatan kualitas laporan keuangan.

C. Pembahasan Hasil Analisis Data

C.1 Pengaruh Sistem Akuntansi Digital terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil analisis, variabel Sistem Akuntansi Digital memiliki nilai t-statistic sebesar 3,900 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari batas yang ditentukan ($p < 0,05$) dan nilai t-statistic lebih besar dari nilai t-tabel ($3,900 > 1,96$), maka hipotesis pertama (H1) dinyatakan diterima. Selain itu, nilai koefisien jalur sebesar 0,412 menunjukkan bahwa pengaruh yang ditimbulkan bersifat positif dan signifikan.

Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan sistem akuntansi digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berkontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem akuntansi memberikan dampak positif terhadap efisiensi operasional, akurasi pencatatan, dan keandalan pelaporan transaksi keuangan. Dengan sistem yang terintegrasi dan terdokumentasi secara digital, laporan keuangan dapat dihasilkan secara lebih cepat, tepat waktu, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Hal ini juga mendukung proses audit eksternal oleh BPK, yang kemudian tercermin dalam pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Penelitian yang dilakukan oleh Tawaqal dan Suparno (2017) juga menggaris bawahi pentingnya penerapan sistem informasi akuntansi dalam lingkungan instansi pemerintahan. Mereka menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pengelolaan transaksi keuangan. Tanpa penerapan sistem yang memadai, instansi pemerintahan berpotensi mengalami kesulitan dalam memproses transaksi secara akurat dan sistematis, yang pada akhirnya dapat menghambat kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Sesuai dengan teori *stewardship*, pemerintah daerah berperan sebagai pengelola (*steward*) yang berkewajiban untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai upaya dalam mengelola serta menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, disajikan secara jujur, dan sesuai dengan standar yang berlaku sehingga dapat memberikan manfaat bagi pihak principal (Jelfri, 2018).

C.2 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai T-statistik dan signifikansi sebesar 6,157 dan 0,000. Maka, nilai signifikansi variable kompetensi sumber daya manusia lebih kecil dari 0,05. Selain itu, nilai T-statistik lebih besar dari T-tabel yaitu $6,157 > 1,96$. Hasil penelitian juga menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,600. Hal ini menandakan bahwa variable kompetensi sumber daya manusia (X_2) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan (Y). Sehingga hipotesis kedua (**H2**) **diterima**.

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia, khususnya dalam memahami prinsip-prinsip akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta pemahaman terhadap struktur organisasi di instansi tempat bekerja, berkontribusi secara signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan yang andal dan relevan. Temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian oleh Sumaryati, Novitasari, dan Machmudah (2020) yang menyatakan bahwa aparatur sipil negara perlu secara aktif mengembangkan kompetensi melalui pelatihan dan peningkatan wawasan di bidang akuntansi, baik secara teoritis maupun praktis, termasuk penguasaan terhadap sistem manual maupun berbasis komputerisasi.

Selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan temuan Gasperz (2019) yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

laporan keuangan di wilayah Maluku. Penelitian tersebut menekankan bahwa penguatan kompetensi dapat dicapai melalui program pendidikan dan pelatihan yang sistematis bagi para penyusun laporan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam menghasilkan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan sesuai standar.

Teori stewardship beranggapan bahwa individu dalam organisasi dalam hal ini aparatur pemerintah daerah memiliki niat dan motivasi yang selaras dengan tujuan organisasi, yaitu memberikan pelayanan publik yang baik dan akuntabel. Pegawai pemerintah sebagai steward atau pengelola bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya publik secara optimal dan melaporkannya secara transparan serta sesuai standar yang berlaku.

Semakin tinggi kompetensi seorang aparatur, baik dari sisi penguasaan teknis akuntansi, pemahaman terhadap regulasi pelaporan keuangan, maupun penguasaan sistem informasi akuntansi, maka akan semakin besar kemampuannya untuk menyusun laporan keuangan yang akurat, jujur, dan tepat waktu. Ini mencerminkan nilai-nilai dasar dari stewardship yaitu tanggung jawab, loyalitas, dan orientasi terhadap tujuan jangka panjang organisasi, bukan sekadar kepentingan pribadi.

Temuan ini juga memperkuat pandangan bahwa kompetensi pegawai bukan hanya soal kemampuan teknis, tetapi juga representasi dari komitmen moral dan profesionalisme dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan publik. Dengan demikian, kompetensi SDM yang tinggi mendukung prinsip-prinsip stewardship, yakni kejujuran dan integritas dalam pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan.

C.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal (SPI) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (KLK) dengan arah hubungan negatif (koefisien = -0,085, *t-statistic* = 2,028, *p-value* = 0,043). Meskipun hipotesis (**H3**) diterima karena memenuhi signifikansi statistik ($p < 0,05$), arah negatif dari koefisien tersebut mengindikasikan bahwa penerapan SPI di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro saat ini belum mampu mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan secara optimal.

Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti pelaksanaan SPI belum dijalankan secara efektif masih bersifat administratif dan belum menyentuh aspek substansial dari pengendalian risiko dan kepatuhan, pelatihan dan pemahaman terhadap pengendalian internal



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

masih rendah di kalangan OPD.

Dalam penelitiannya mengenai SPI pada instansi pemerintahan daerah, ditemukan bahwa SPI yang tidak dijalankan secara menyeluruh dan hanya bersifat formal tidak memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan temuan Anda bahwa SPI bisa berdampak negatif bila tidak diimplementasikan dengan baik (Putri & Lestari, 2021)

Sari (2019), menemukan bahwa SPI tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan karena masih lemahnya pelaksanaan pengendalian, kurangnya monitoring, serta rendahnya kompetensi pelaksana SPI.

Yuliana (2020), memberikan hasil bahwa SPI pengaruh negatif pada kualitas laporan keuangan, hal ini dapat terjadi ketika SPI bersifat terlalu birokratis, sehingga memperlambat proses penyusunan laporan dan menyebabkan ketidaktepatan waktu serta penurunan kualitas.

Bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro hasil ini menjadi indikator penting bahwa meskipun struktur pengendalian telah dibentuk, efektivitas pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan. Evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengendalian internal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa SPI benar-benar berfungsi sebagai sistem yang mendukung akuntabilitas dan peningkatan kualitas laporan keuangan.

PENUTUP

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Digital memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Hal ini menggambarkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah telah berjalan secara efektif dan mendukung proses pelaporan keuangan yang transparan dan andal. Hal tersebut tercermin dari keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini menunjukkan hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia dalam penyusunan kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari seberapa besar pengetahuan, ketrampilan, kemampuan dan pengalaman dalam menyusun laporan keuangan tersebut. Sistem Pengendalian Internal



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro namun masih memerlukan penguatan agar dapat mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan secara optimal.

Penelitian di masa mendatang disarankan untuk menggunakan metode wawancara langsung kepada responden guna memperoleh data yang lebih mendalam, komprehensif, dan valid. Selain itu, peningkatan jumlah populasi dalam pengambilan sampel juga perlu dipertimbangkan, terutama dengan melibatkan Kepala OPD sebagai Pengguna Anggaran agar diperoleh perspektif yang lebih representatif. Penelitian berikutnya juga diharapkan dapat memperluas variabel yang diteliti dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berpotensi memengaruhi kualitas laporan keuangan, seperti tingkat kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta implementasi prinsip-prinsip *Good Government Governance* (GGG), yang belum dikaji dalam penelitian ini.

REFERENSI

- Bestari, K. A., & Wahyuni, F. (2023). Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 7(1), 163–184. <https://doi.org/10.18196/rabin.v7i1.16995>.
- BPK Provinsi Jawa Timur. (2023b). LKPD Kabupaten Bojonegoro 2023 – WTP. <https://jatim.bpk.go.id/hasil-pemeriksaan/lhp-lkpd/lkpd-kabupaten-bojonegoro-tahun-2023-wtp/>.
- Donaldson, L., & J.H, D. 1991. Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. *Australian Journal of Management*, 16(49–64).
- Dzahabiyah, R. K., & Ardini, L. (2023). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Bpkad Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(5), 1–21.
- Gasperz, J. J. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Badan Pusat Statistik Wilayah Maluku). *JBMP (Jurnal Bisnis, Manajemen Dan Perbankan)*, 5(2), 75–83. <https://doi.org/10.21070/jbmp.v5i2.2550>.
- Irwan, & Adam, K. (2015). Metode Parial Least Square (PLS) dan Terapannya.
- Hatmawan, A. A., & Riyanto, S. (2020). *Metode Riset Penelitian Kuantitatif (Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen)*. Deepublish.
- Hidayat, Y., & Setiawan, A. (2023). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dimediasi Good Government Governance (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sragen). Skripsi Thesis, UIN Surakarta.
- Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2010) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta.
- Rifandi, Z. W. (2019). Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Sumber



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

- Daya Manusia, Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa.
Rosmalita, N., & Nadirsyah, N. (2020). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(2), 239–248. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i2.15559>.
- Sahir, S. H. (2022a). *Metodologi Penelitian*. Penerbit KBM Indonesia.
- Sari, T. K. (2022). Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Setyowati, L., Isthika, W., Pratiwi, R. D., & Nuswantoro, U. D. (2016). Faktor- faktor yang mempengaruhi kualitas laporan. *Kinerja Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 1, 179–192.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Halaman 140.
- Sumaryati, N., & Machmuddah. (2020). Accounting Information System, Internal Control System, Human Resource Competency and Quality of Local Government Financial Statements in Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(10), 795–802.
- Tawaqal, I., & Suparno. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 02(04), 125–135.
- Varista, V. (2022). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (SKPD Kab. Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
- Veny ,M. S, & Dwi. S. (2024). Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(5), 4390 –. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i5.1720>.